

MANAJEMEN USAHAWAN INDONESIA

NO. 06/TH. XXXVIII 2009



TEORI SINYAL dalam manajemen keuangan



TULISAN UTAMA

Teori Sinyal dalam Manajemen Keuangan
Tatang A. Gumanti

TINJAUAN

Proses Kultural dalam Manajemen Indonesia
Bob Widyahartono

JURUS

Relationship Marketing: Konseptualisasi Serta Implikasi
Ign. Heruwasto

PEMIKIRAN

Strategi Privatisasi dan Penerbitan Surat Utang Negara R.I di Tengah Surutnya Kapitalisme Finansial Dunia
Zahrida Z Wiryawan



Apakah Privatisasi BUMN Solusi yang Tepat Dalam Meningkatkan Kinerja?
Dewi Hanggraeni

Memahami Perilaku Oportunistik *Earning Management* dalam Perspektif Psikologi
Iqbal M. Aris Ali

semua dimulai dari kita sendiri



save our earth, save our live

Iklan layanan masyarakat ini
dipersembahkan oleh:



Lembaga Management
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

MANAJEMEN
USAHAHARI
INDONESIA

MANAJEMEN USAHAWAN INDONESIA

TULISAN UTAMA

- **Teori Sinyal dalam Manajemen Keuangan**
Tatang A. Gumanti. 4

TINJAUAN

- **Proses Kultural dalam Manajemen Indonesia**
Bob Widyahartono 14

PEMIKIRAN

- **Strategi Privatisasi dan Penerbitan Surat Utang Negara R.I di Tengah Surutnya Kapitalisme Finansial Dunia**
Zahrida Z Wiryawan ✓ 18
- **Apakah Privatisasi BUMN Solusi yang Tepat Dalam Meningkatkan Kinerja?**
Dewi Hanggraeni 27
- **Memahami Perilaku Oportunistik *Earning Management* dalam Perspektif Psikologi**
Iqbal M. Aris Ali 36

JURUS

- ***Relationship Marketing:* Konseptualisasi Serta Implikasi**
Ign. Heruwasto 49

ON THE OTHER SIDE

- **Kualitas vs Popularitas**
Herry Soebhiantoro 53



Menutup tahun 2009, Manajemen Usahawan Indonesia terbit dalam format tampilan cetakan baru. Berbagai perbaikan kedepan akan terus kami lakukan. Kami berterima kasih atas dukungan dari anda semua para pembaca, penulis, sponsor dan penerbit, kami akan terus berupaya untuk berkembang menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Dalam **Tulisan Utama**, edisi penutup 2009 ini mengangkat perkembangan teori sinyal dalam praktek manajemen keuangan kontemporer. Teori sinyal beserta segala aplikasinya dalam perkembangan manajemen keuangan dibahas secara mendalam oleh Tatang Ary Gumanti. Sementara Bob Widyahartono dalam rubrik **Tinjauan**, mengangkat bagaimana konsep dan praktek manajemen gaya Indonesia banyak dipengaruhi oleh karakter budaya yang ada di Indonesia, semua itu ditelaahnya dari berbagai literatur. Kami harap pembahasan ini dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai seluk beluk gaya manajemen Indonesia yang melatarbelakangi strategi dan tindakan yang dilakukan perusahaan-perusahaan lokal dalam menghadapi persaingan.

Di dalam rubrik **Pemikiran** diangkat bidang manajemen keuangan negara yang mengungkap berbagai alternatif yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia dalam menutup defisit anggaran negara hasil studi dari Zahrida Z Wiryawan. Dilanjutkan dengan studi dari Dewi Hanggraeni yang mempertanyakan efektivitas privatisasi BUMN sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja. Terakhir, masih di bidang manajemen keuangan, Iqbal M. Aris Ali menjabarkan dalam tulisannya bagaimana memahami praktek *earning management* dilihat dari sudut pandang psikologi.

Untuk membuat edisi ini lebih lengkap, kami menyajikan kolom **Jurus** yang membahas bagaimana mengkonseptualisasi Relationship Marketing dalam praktek, serta kolom **On the Other Side** yang membahas kontroversi antara kualitas dan popularitas serta bagaimana menjadi pemasar yang *competition oriented*. Kami harap sajian dalam edisi penutup 2009 ini dapat memberikan manfaat bagi anda para pembaca.

Terima kasih dan selamat membaca.

PELINDUNG: Firmanzah, Phd (Dekan FEUI), Toto Pranoto, SE, MM (Kepala LMFEUI) ■ **PEMIMPIN UMUM:** Dr. Willem A. Makaliwe ■ **SENIOREDITOR:** Dr. Willem A. Makaliwe; Dr. Buddi Wibowo ■ **MANAGING EDITOR:** R. Nugroho P. ■ **DISTRIBUTION:** Jaka Sanwani ■ **OPERATION:** Sapari ■ **MARKETING:** Nurdih Nurdadi ■ **ALAMAT REDAKSI:** Lembaga Management FEUI, Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta, Telepon: (062)(21) 31934142, 3907410, Faksimil: (062)(21) 31931610, E-mail: usahaawan_lmfeui@yahoo.com, Website: www.lmfeui.com, Bank BNI Cab. Kramat, No. Rek.0010539802 a.n Lembaga Management FEUI, No. 01604/SK/DTJEN, PPG/STT/1990, SIC: Kep. 096/p.c/1971, ISSN: 0302-9859

MANAJEMEN & USAHAWAN INDONESIA

Adalah media dwibulanan yang bertujuan memajukan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan keterampilan manajemen, guna meningkatkan daya dan hasil perusahaan/organisasi di Indonesia. Artikel yang dimuat mengutamakan penerapan dan adaptasi ilmu manajemen dalam masyarakat. Media ini ditujukan kepada para usahawan swasta maupun pemerintah, manajer, mahasiswa dan pihak-pihak lain yang menaruh minat atas pengetahuan manajemen. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkan pandangan redaksi. Setiap tulisan yang dimuat menjadi hak media ini dan setiap tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai perangko secukupnya. Sertakan alamat lengkap; email, no. telp, no. Rekening Bank pada tulisan yang dikirimkan ke Usahawan

Memanfaatkan Majalah Anda Secara Optimal

Manajemen Usahawan Indonesia dalam 38 tahun perjalannya telah mengalami "revitalisasi". Selain frekuensi terbit 2 bulanan sejak periode 2008, majalah anda juga "diperbaiki" darisegitampilan maupun isi. Semua untuk membantu anda memanfaatkan majalah ini secara optimal. Semoga "revitalisasi" yang kami lakukan berkenan bagi anda.

Penamaan kolom dalam majalah ini juga kami ubah dalam bentuk yang lebih standar agar membantu anda mencari "bagian" majalah yang menjadi bacaan favorit anda. Pengolongan kolom di majalah ini akan kami jelaskan berikut ini:

Tulisan Utama

Kolom ini memuat artikel yang kami pilihkan sebagai topik paling menarik di edisi majalah ini. Kriteria artikel yang kami "kedepankan" sebagai tulisan utama adalah topik bahasan yang berguna bagi anda pembaca dalam memecahkan persoalan manajemen sehari-hari namun juga memberi wawasan baru pengetahuan.

Pemikiran

Kolom ini memuat artikel hasil kontribusi para pembaca yang telah melakukan riset baik studi literatur maupun studi yang bersifat eksploratif ataupun konklusif. Kolom ini kami buat untuk membantu anda para pembaca yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan dengan turut menyebarluaskan berbagai hasil riset ilmiah yang dilakukan kontributor kami.

Tinjauan

Dalam edisi-edisi tertentu, kami akan membuat kolom **tinjauan** yang berisi pembahasan trend perkembangan baik di bidang ekonomi, industri, hingga perubahan sosial yang kami anggap membawa dampak besar bagi cara berbisnis di masa depan. Bagi para pembaca yang ingin memberikan kontribusi untuk kolom ini, kami tunggu karya anda dengan tangan terbuka.

Liputan

Pada edisi khusus, kami akan menyajikan kolom **liputan** yang kami buat mengenai suatu tokoh, peristiwa, perusahaan, ataupun daerah/wilayah yang kami anggap menarik dalam bentuk kupasan lengkap mengenai berbagai masalah bisnis dan usaha penanganan yang telah dilakukan.

Studi Kasus

Diedisi tertentu kami akan menyajikan kolom **studi kasus**, yang merupakan adaptasi dari persoalan bisnis atau manajemen nyata yang dihadapi sehari-hari dalam bentuk

kisah dengan tokoh dan latar belakang fiksi. Di akhir artikel akan dibahas mengenai pendapat para ahli ataupun praktisi dalam memecahkan masalah yang disajikan di **studi kasus**. Kami berharap kolom ini dapat membantu anda "belajar" bagaimana memecahkan sebuah persoalan bisnis atau manajemen.

Resensi

Kolom **resensi** sudah ada sejak lama, dalam kolom ini kami mengupas berbagai buku ataupun jurnal ilmiah yang kami anggap menarik dengan bahasa yang lugas dan singkat. Kami berharap dengan kolom **resensi** ini anda lebih tertarik untuk mempelajari lebih jauh buku atau jurnal yang kami ajukan.

Jurus

Ini merupakan kolom baru, **jurus** akan membahas berbagai tips manajemen dan alat analisis yang dapat anda gunakan untuk memecahkan masalah bisnis atau manajemen yang anda para pembaca hadapi. Tidak banyak kata dari kami, semoga saja dapat membantu.

On the Other Side

Manusia membutuhkan "penyegaran", kami percaya anda para pembaca juga membutuhkannya. Kolom ini akan menampilkan artikel yang isinya "bertolak belakang" dari konsep-konsep bisnis dan manajemen yang ada selama ini.

Selamat "menikmati" majalah anda, terima kasih atas kontribusi yang telah anda berikan dengan menjadi pembaca setia kami selama ini. Semoga "revitalisasi" ini berkenan bagi anda. Tiada kata lain yang dapat kami ucapkan selain TERIMA KASIH.

Redaksi



Strategi Privatisasi dan Penerbitan Surat Utang Negara RI di Tengah Surutnya Kapitalisme Finansial Dunia

Zahrida Z Wiryawan

Di tengah kemelut krisis finansial global, pemerintah RI menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan anggaran negara, dimana hampir 100% defisit anggaran diharapkan dapat ditutup dari hasil penjualan obligasi ritel seperti SUN. Pilihan lain ialah melakukan privatisasi BUMN, yang dengan belum mendukungnya kondisi ekonomi membuat pilihan ini sulit dilakukan. Pemerintah RI seharusnya dapat menempuh cara selain 2 cara tersebut. Tulisan ini membahas berbagai alternatif lain yang dapat ditempuh.

*D*ani Roderick (1996) merumuskan elemen-elemen Konsensus Washington dalam 10 butir dimana salah satunya adalah program 'privatisasi' berupa keharusan menjual badan usaha milik negara (BUMN) ke pasar yang menjadi salah satu ciri khas kebijakan ekonomi neo-liberal untuk menambah pemasukan negara disamping kebijakan lain berupa 'deregulasi' serta 'liberalisasi pasar' dsb. Kebijakan tsb untuk menghilangkan hambatan modal asing memasuki pasar sebuah negara selain memudahkan membeli asset negara tujuan modal asing itu.

Menurut program pemerintah, privatisasi di Indonesia mestinya digulirkan kembali oleh karena lewat kementerian terkait telah disiapkan rencana, metode serta tatacara privatisasi BUMN yang masuk dalam program restrukturisasi dan privatisasi Masterplan BUMN tahun 2005-2009. Payung induknya ialah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Alasan yang dikemukakan pemerintah senantiasa klasik: untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, di samping untuk mempermudah kementerian dalam menata kelola (manajemen) usaha

secara transparansi berdasarkan program yang berorientasi profit (*Jurnal BUMN*, edisi 1 Februari 2008, hal 12). Namun demikian, berdasarkan berita-berita di mass-media (misalnya *Kompas*, 31 Juli 2009 hal 18), pemerintah dengan persetujuan Panitia Anggaran DPR telah membatalkan rencana privatisasi BUMN tahun 2009 akibat kondisi perekonomian dunia dewasa ini. Dengan demikian, target untuk memperoleh tambahan dana sebesar Rp 500 miliar guna membantu menutup defisit APBN batal sehingga pemerintah mengambil opsi menaikkan target setoran dividen dari BUMN (*Jakarta Post*, 14 Agustus 2009, hal.13).

Sebenarnya, program privatisasi dimulai di Inggris semasa pemerintahan Margaret Thatcher pada awal tahun 1980an, kemudian merambah ke negara-negara maju serta negara berkembang (Vickers dan Yarrow, 1988), seperti Perancis dan Indonesia. Bello (sebagaimana dikutip oleh Vedi R Hadiz, 2009) menyebutkan bahwa mulai tahun 1980an dunia melakukan proses restrukturisasi neo-liberal berbentuk Reaganisme dan Thatcherisme di wilayah negara-negara maju di Utara. Ronald

Reagan, sebagaimana diketahui, merupakan presiden A.S periode 1981-1989 yang mengurangi peran negara dalam perekonomian, sedangkan Margaret Thatcher adalah perdana menteri Inggris masa 1979-1990 yang melakukan langkah sistematis menghilangkan program kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Program privatisasi merupakan pengalihan kepemilikan saham suatu perusahaan negara/BUMN kepada investor swasta, berupa: "The transfer of government productive assets to private investors" (Boubakri, Cosset dan Smaoui 2009:840) Awalnya, privatisasi dianggap penting bagi negara-negara bekas blok Timur agar mampu mengembangkan bisnis di era persaingan global. Sedemikian gencarnya privatisasi dilakukan, sehingga oleh Kvint (1994) Rusia dicontohkan sebagai sebuah negara yang sedang melelang BUMN mereka. Jika terlambat, investor bakal kehilangan kesempatan.

Keadaan serupa juga menjalar ke Indonesia berupa pelelangan BUMN di tengah-tengah program privatisasi yang semula ditentukan dalam L-o-I antara pemerintah Indonesia dengan IMF sebagai bagian dari program *structural adjustment* yang didorong oleh IMF serta Bank Dunia. Program IMF dan Bank Dunia itu berkepanjangan dengan niat pemerintah meneruskan privatisasi seperti disebutkan pada bagian awal artikel ini. Mengingat pengalaman privatisasi mengungkapkan banyaknya permasalahan yang timbul di negara-negara bekas Blok Timur akibat tidak jelasnya program privatisasi itu dilaksanakan (Kvint, 1994), artikel ini mencoba melihat privatisasi sebagai salah satu alat pelaksanaan kebijakan pembangunan perekonomian model pasar bebas era liberalisasi serta dampaknya bagi rakyat Indonesia jika terus berlangsung. Juga untuk menilai betapa rawannya upaya pemerintah Indonesia terus menerus mengambil kebijakan menambah utang negara dalam rangka menutupi defisit APBN tanpa mau melihat alternatif lain, misalnya upaya melakukan rescheduling utang, restrukturisasi utang, ataupun meminta *hair-cut* yang umum dilakukan dan sudah mendesak dilakukan mengingat

privatisasi makin sulit dilaksanakan. Sedangkan penciptaan utang baru dengan menerbitkan surat utang negara/SUN hanya dimungkinkan dengan *yield* atau biaya yang sangat tinggi membebani keuangan negara juga pada akhirnya. Penerbitan utang baru pun sulit pula dilakukan akibat program pemulihan ekonomi Amerika Serikat berbentuk program *Troubled Assets Relief Program (TARP)* yaitu BPPN-nya A.S. (*Media Indonesia*, 5 Oktober, hal. 1)

Privatisasi Sebagai Sebuah Strategi Klasik Liberalisasi Pasar

Para pendukung privatisasi mendalilkan bahwa pengurangan kepemilikan negara bakal meningkatkan kinerja perekonomian negara (lihat "Privatisasi mendongkrak laba bersih" seperti disampaikan oleh Meneg BUMN dalam *Jurnal BUMN* 01/Febr 2008 hal 12-13). Dengan kurangnya atau lepasnya kendali negara lewat kepemilikan saham, perusahaan lebih lincah mengambil keputusan manajerial strategis tanpa hambatan birokratis lagi. Sebagai *out-put* privatisasi, manajemen lebih mampu merespons dinamika pasar, meningkatkan daya-saing di pasar, yang akhirnya bermuara kepada peningkatan kontribusi perusahaan bagi perekonomian negara.

Dalam konteks itu, perlu dicatat bahwa semua perusahaan negara/BUMN yang diprivatisasi di negara-negara bekas Blok Timur merupakan perusahaan yang terbelakang akibat teknologi yang *out-of-date*, kekurangan modal serta manajemen yang juga sudah kuno akibat kungkungan birokrasi ketat sehingga selalu merugi. Itulah sebab utama privatisasi dianggap mutlak dilakukan di negara-negara itu guna (1) memperoleh teknologi mutakhir, (2) mendapatkan modal baru, dan (3) memiliki manajemen yang piawai sehingga melalui privatisasi perusahaan/BUMN diharapkan melakukan *turn around* kinerjanya dalam melaksanakan maksimasi *shareholders' wealth* (Aharoni, 1986; Goodman dan Lovemen, 1991; Megginson dan Netter, 2001). Pengertian peran negara ini merefleksikan pemikiran liberalisasi pasar bebas, dengan *patron saint*-nya Adam Smith

sebagai 'nabi' kaum liberal dan bertumpu kepada kepentingan pribadi atau *pamrih pribadi (self-interest)* dalam kehidupan dan mekanisme perekonomian negara, sejalan dengan semboyan *laissez-faire* yang diusungnya.

Gurubesar FE-UGM, Budi Winarno (2009), menguraikan sejarah bagaimana neo-liberalisme sebagai varian liberalisme baru bangkit dengan memanfaatkan arus naik globalisme sebagai titik tolak. Neo-liberal merupakan kebijakan satu paket dengan dengan globalisasi yang menempatkan pasar sebagai utama dan pokok. Eksistensi kelompok neo-liberal kian menonjol setelah kebijakan yang bersandar pada Keynesian merosot pada tahun 1970an. Teori ekonomi Keynes didasarkan atas pentingnya peran negara dalam menggerakkan perekonomian. Keynes berpendapat bahwa pasar tak mungkin mampu mengoreksi dirinya sendiri sehingga pemerintah harus melakukan intervensi, dengan menerbitkan regulasi sebagai sandaran para pelaku ekonomi.

Kebijakan pembangunan ekonomi bersandarkan teori John Maynard Keynes (1936, cetak ulang a. dalam 1964 oleh Harbinger Book) dituangkan dalam karya monumentalnya: "The General Theory of Employment, Interest, and Money" dan oleh sementara pihak dianggap menjadi landasan teori penyelamat perekonomian Amerika Serikat pada saat terjadi Depresi Besar (malaise) tahun 1920-1930an berupa program *New Deal* yang diluncurkan oleh presiden A.S. saititu, Franklin Delano Roosevelt (FDR), bersama dengan program Jaminan Sosial/Social Security pertengahan tahun 1930an.

Dalam masa krisis ekonomi besar di dunia yang menimbulkan resesi berkepanjangan di seluruh dunia sehingga menyebabkan timbulnya kondisi yang disebutkan Keynes sebagai 'liquidity trap' dimana 'almost everyone prefers holding cash to holding debt' (1964:207), pemerintah termasuk bank sentral akan kehilangan kontrol terhadap tingkat bunga rendah dan investasi sulit datang sebab orang tak ingin kehilangan peluang mengambil keuntungan saat tingkat suku bunga dinaikkan di masa depan. Bahkan, menurut Keynes lagi,

orang juga menolak memegang *bonds* atau obligasi dengan bunga rendah. Kondisi *liquidity traps* kini muncul saat keterpurukan sistem kapitalisme finansial dewasa ini yang telah memicu resesi di mana-mana (MacKenzie, 2008). Akibatnya, *interest rate/yield* di negara-negara maju (A.S, Jepang) menjadi amat rendah, umumnya kurang dari 2% per tahun terhadap mata uang US\$ misalnya sebagai upaya menolong sektor riil supaya konsumen ter-stimulasi membeli dengan cicilan rendah bunga.

Karena kebutuhan yang besar atas pendanaan untuk menolong perekonomian, FDR memutuskan melakukan pula intervensi pasar berupa pengeluaran belanja negara besar-besaran demi memberikan stimulus meningkatkan kegiatan perekonomian, khususnya *demand* terhadap sektor riil seperti saran Keynes. Secara singkat, program intervensi pasar FDR dengan *New Deal* itu lambat laun mengeluarkan A.S dari krisis depresi ekonomi dunia tahun 1920-1930an, dan kemudian menyuliah Perang Dunia II sehingga perhatian dunia serentak beralih kepada perang dunia tsb. Kebijakan *government spending* serupa saat ini juga dilakukan oleh presiden Barack Obama dengan mengeluarkan uang kas pemerintah melakukan program *bail out* perusahaan-perusahaan korporasi besar A.S (TARP) sehingga defisit anggaran pemerintah A.S mencapai \$1,09 triliun, atau 12,7% dari PDB mereka (Siswono Yudo Husodo, 2009). Berita-berita terakhir malah menunjukkan bahwa defisit membengkak mendekati \$2 triliun, yang menambah hutang nasional A.S menjadi sebesar \$11,5 triliun. Dengan mengambil kebijakan itu pada hakekatnya Obama telah menanggalkan 'mantra' kaum neo-liberal berupa kemutlakan pasar bebas yang menihilkan peran negara karena 'Paman Sam'-lah yang kini memegang kepemilikan serta kendali atas korporasi yang telah menerima dana negara itu (Pesek, 2009). Kondisi teranyar ini juga menunjukkan bahwa kapitalisme finansial pasar bebas tengah menunggu sebuah 'Requiem dini' (upacara agama bagi sesorang yang meninggal) menjelang ajal tiba (Yudi Latif, 2009).

Untuk menutup defisit yang kian besar, selama ini pemerintah A.S menerbitkan obligasi dengan jumlah besar. Mengingat bahwa tahun 2009/2010 pemerintah Indonesia akan mengalami puncak jatuh tempo utang berikut bunga, pemerintah RI juga menerbitkan obligasi/SUN karena paling sedikit 16% APBN RI ditutup dengan pinjaman luar negeri dan defisit APBN-Perubahan 2009 memerlukan 100% pendanaan dari SUN (Aditya Suharmoko, 2009a). Anatomi APBN-P terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai serta PNBP; pengeluaran berunsur biaya rutin, biaya pembangunan, bagian daerah berbentuk dana alokasi khusus dan umum, pembayaran utang berikut bunga utang. Dari segi APBN, beberapa tahun terakhir penerimaan negara di luar utang menjadi lebih kecil dari biaya utang serta pengeluaran pembangunan. Berarti, untuk menambah biaya rutin serta pembangunan, pemerintah mesti membuat utang baru. Untuk mengangsur utang lama berikut bunganya, pemerintah juga mesti membuat utang baru (Siswono Yudo Husodo, 2009). Posisi utang jatuh tempo pada 2009 mencapai Rp 97,7 triliun dengan porsi utang luar negeri sebesar Rp 56,65 triliun. Tetapi porsi utang dalam negeri terus naik dari penerbitan surat utang dalam negeri (Dwi Tupani, 2009).

Dalam keadaan sulit seperti ini, tidak heran jika opsi awal bagi pemerintah ialah terus melakukan privatisasi berupa menjual asset negara seperti BUMN seperti yang telah digariskan dalam Masterplan BUMN 2005-2009 tsb. Ada 37 BUMN yang menurut program semula yang akan diprivatisasi, misalnya Jasindo, Krakatau Steel, Bank Tabungan Negara/ BTN, Semen Baturaja, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Waskita Karya, Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Industri Gelas, Industri Soda Indonesia yang menggunakan mekanisme IPO. Yang menggunakan metode *strategic sale* langsung kepada investor individual tanpa melalui mekanisme IPO/Pasar Modal, ialah Djakarta Lloyd, Sarinah, Industri Sandang, Sarana Karya dan INTI. Lainnya ialah BUMN dimana kepemilikan saham pemerintah merupakan minoritas, kurang dari 51 persen.

Jika di negara-negara ex Blok Timur yang diprivatisasi merupakan perusahaan-perusahaan yang **sekarat** sehingga perlu diliwidasi atau di jual kepada mereka yang mau membeli mengingat potensi pasarnya masih cukup baik, berbeda dengan di Indonesia. Kenyataannya di Indonesia privatisasi dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan BUMN/ex-BPPN yang kinerjanya justru **baik** dan **profitable** seperti Indosat dan BCA dulu, ataupun PGN, WiKa, Jasa Marga dan BNI semasa pemerintahan sekarang. Bahkan, dengan mengacu kepada UU No 19 Tahun 2003 pasal 82 ayat 2, proses privatisasi BUMN tidak konsisten mengikuti alur perintah UU tsb: seleksi, rekomendasi, sosialisasi, konsultasi dan implementasi sebagaimana dijelaskan dalam PP No 22/2005, sering kali terbalik-balik prosesnya. Dalam kaitan ini, Murtha dan Lenway (1994) menganggap perlu memperhatikan 3 faktor penting agar privatisasi berlangsung sesuai program yang ditentukan, yaitu (1) karakteristik negara ybs, (2) kebijakan umum di bidang industri yang berlaku, dan (3) strategi calon pembeli BUMN ybs. Konsep Murtha dan Lenway (1994) dijadikan landasan utama analisis artikel ini selain dari konsep Lenway dan Murtha (1994) yang akan dibahas kemudian. Pertimbangan penggunaan konsep mereka ialah karena mereka berdua merupakan pakar yang banyak melakukan penelitian mengenai program privatisasi yang marak dilakukan dalam dasawarsa 1980an.

Dengan batal atau ditundanya rencana privatisasi padahal kebutuhan pendanaan menutup defisit APBN-P makin membengkak untuk mencicil utang lama, membayar bunga utang lama serta pembiayaan rutin dan biaya pembangunan, pemerintah semakin terdesak untuk menambah stok utang barunya secara absolut. Dalam APBN-P tahun 2009, defisit tadi ditetapkan sebesar Rp 133 triliun dengan hasil penjualan SUN termasuk ORI 006 sebesar Rp 8,54 triliun pemerintah telah menjual seluruhnya Rp 119,37 triliun atau 82,58% target keperluan pendanaan defisit APBN-P 2009.

Besarnya penerbitan surat utang negara/SUN dengan *yield* 11,625% (INDO

BOND 011 jatuh tempo 2019), menyebabkan gairah perbankan menyalurkan kredit ke sektor riil tersendat karena bank lebih memilih membeli SUN yang lebih menguntungkan dan relatif lebih menguntungkan daripada disalurkan berupa kredit. Dampak negatifnya tentu mengancam pertumbuhan investasi di sektor riil karena pasar keuangan internasional dan domestik tengah mengalami efek *crowding out* dimana pemerintah bersaing dengan swasta dalam mencari dana segar dengan akibat naiknya *cost of money*. Jadi tidak mengherankan bahwa tingkat suku bunga bank tetap tinggi walau BI rate telah kembali turun dengan 25 basis point menjadi 6,5% sebagai pancingan akibat *yield* obligasi yang tinggi (KOMPAS, 11 Agustus 2009, hal. 1).

Tingginya suku bunga bank menyebabkan kredit kepada sektor riil tetap tersendat karena dalam krisis ekonomi dunia perbankan semestinya melakukan penurunan suku bunga mendekati *flat/low* seperti dilakukan di A.S, Jepang dll (Outline Bank Indonesia, Agustus 2009). Aditya Suharmoko (2009b) menulis bahwa kucuran kredit perbankan selama periode Desember 2008 hingga Juni 2009 hanya tumbuh dengan 2,09%, dari Rp 1.307,69 triliun menjadi Rp 1.335,04 triliun. Dari perbandingan Y-o-Y, pertumbuhan kucuran kredit Juni 2008 dengan Juni 2009 sebesar 16,26%. Seretnya kucuran kredit ini menyebabkan Bank Indonesia menurunkan angka perkiraan pertumbuhan kredit tahun 2009 dari 15% menjadi 12%. Rendahnya kucuran kredit kesektor riil akibat masih tingginya suku bunga dapat mengganggu program pemulihan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang (Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia No 12 Maret 2009). Apalagi, umumnya pembelian SUN dilakukan dengan dana-dana *hot money* yang sangat berpotensi menimbulkan dampak *sudden reversal* dalam jumlah signifikan setiap kali timbul sentimen global negatif. Tentu akan memberikan tekanan ke bawah pada harga assets di Indonesia selain menimbulkan kepanikan bagi investor dalam negeri (Wimboh Santoso, Bagus Santoso, Ita Rulina dan Elis Deriantino,

2009). Tindakan *sudden reversal* terjadi pada Semester II 2008 ketika investor asing melakukan realisasi *gain* sehingga terjadi *outflows* investasi asing pada assets keuangan rupiah senilai Rp 20,4 triliun, padahal semester sebelumnya terjadi *inflows* Rp 18,5 triliun dengan dampak negatif.

Kondisi seretnya dana di mana investor menolak *yield* rendah ini telah jauh-jauh hari diramalkan oleh Keynes (1936/1964) seperti telah dituliskan di atas. Mau-tidak-mau, pemerintah terpaksa memasarkan SUN dengan tingkat *yield* yang lebih tinggi agar laku. Kondisi ini akan menyebabkan timbulnya tekanan lebih besar lagi bagi APBN-APBN masa yad karena beban bunga tinggi yang mesti ditanggung. Sebagai akibatnya, pemerintah yad mesti menerbitkan utang baru terus menerus sebagai sebuah mata-rantai yang berputar terus menerus pula.

Sebenarnya, sudah waktunya pemerintah mempertimbangkan opsi lain daripada menerbitkan utang, privatisasi dsb mengikuti pola pembangunan ekonomi klasik, misalnya dengan melakukan program *debt restructuring, hair-cut, renegotiasi* utang luar negeri dll yang memang dimungkinkan jika saja pemerintah memiliki tekad besar mengambil langkah demi kemaslahatan bangsa (Dwi Tupani, 2009). Para pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi seperti Joseph Stiglitz dan Paul Krugman sudah menyuarakan pentingnya pemerintah negara-negara mengambil peran lebih besar tanpa bergantung kepada pasar bebas (Sinar Harapan, 11 Agustus 2009, hal. 7).

Stiglitz (2009) bahkan lantang menyerukan *Options to jump-start the economy: stimulate or die*. William Pesek (2009) dari Bloomberg menegaskan bahwa: "Trillions of dollars of public bail-outs, the US breaking all of the economic commandments it imposed on Asia a decade ago". Inilah gejala yang disebut-sebut sebagai "Senjakala kapitalisme" oleh majalah *Prisma* (vol.28 Juni 2009), dalam edisi pertama penerbitan kembali majalah bergengsi itu setelah hilang dari peredaran sejak 1998. Tidak bisa lagi pemerintah melakukan strategi daur

ulang model pembangunan ekonomi yang tergantung pada mekanisme pasar bebas semata-mata, melainkan harus menata kembali mana yang mesti dijadikan prioritas utama ketika permasalahan yang mendesak untuk ditangani menghadapi kondisi sosio, budaya, politik dan ekonomi berbeda dengan tahun 1970-1980an (Daniel Dhakidae, 2009:43).

Bahkan, sekiranya privatisasi memungkinkan untuk 'dilanjutkan' kembali, masih menyisakan banyak hambatan selain tidak mudah mendapatkan pembeli dalam pasar uang dunia dengan kondisi *crowding out* dan butuh dana segar luar biasa banyak. Program *deficit spending* A.S pun menarik banyak dana segar, tambahan lagi negara-negara seperti China, Singapore, Rusia juga berlomba-lomba menyuntikkan dana stimulus ke perekonomian mereka guna menjaga pertumbuhan dalam negeri sehingga perlu pula pendanaan. China, misalnya, menggelontorkan tidak kurang dari \$600 miliar sehingga mereka mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang lumayan, sekitar 7,9%. Selain itu, masalah karakteristik negara Indonesia seperti diungkapkan Murtha dan Lenway (1994) itu pun mesti diatasi agar jangan sampai terjadi protes massal mengingat belum apa-apa wapres terpilih Boediono (saat artikel ini dituliskan) telah dituduh sebagai neo-lib sehingga pemerintah baru SBY-Boediono mesti berjuang keras melepaskan dirinya dari tuduhan tsb mengingat rasa takut luar biasa terhadap stigma neo-liberal menjelang pemilu presiden 2009 (Fahmy Radhi, 2009). Jika tetap menjalankan program privatisasi, bisa saja menjustifikasi kebenaran sangkaan mengenai agenda ekonomi neo-lib mengingat program privatisasi menjadi bagian dari butir-butir kesepakatan Konsensus Washington.

Nasionalisme dan Karakteristik Bangsa Sebagai Benteng Anti-privatisasi.

Faktor-faktor sebagaimana disebutkan Murtha dan Lenway (1994) tsb perlu dipelajari secara mendalam sebelum program privatisasi dapat di 'copy-paste'

pemerintah Indonesia dari negara lain. Perbedaan mendasar dengan negara lain, misalnya, bisa berupa perbedaan struktur ataupun latar-belakang politis, yang berasal dari lambang-lambang nasionalisme ekonomi yang kuat yang di Indonesia terbentuk melalui amanat Pasal 33 UUD 1945 asli sebelum amandemen 2002, khususnya pasal 33 ayat 1,2, dan 3. Lambang-lambang nasionalisme yang kental inilah yang terusik ketika privatisasi dilakukan terhadap BCA, Indosat dan rencana privatisasi Semen Gresik yang gagal karena mendapatkan resistensi keras di masa lalu, ataupun rencana privatisasi terhadap Krakatau Steel belum terlalu lama ini. Catatan yang perlu dikaji ialah bahwa privatisasi bisa pula diterjemahkan sebagai ketidak-berdayaan rakyat dan negara dalam mengendalikan sumber-daya alam Indonesia sehingga diperlukan pihak asing yang secara gamblang melukai lambang-lambang nasionalisme tadi. Atau terkooptasinya negara oleh kapitalisme finansial pasar bebas seperti disampaikan oleh Klein (dikutip dari Yudi Latif, 2009)

Bangsa Indonesia tidak sendirian menyatakan ketidak-sukaannya terhadap privatisasi sebagian apalagi keseluruhan saham perusahaan negara. A. Tony Prasetyantono (2009) memberikan contoh bagaimana masyarakat Jepang menolak privatisasi saham perusahaan negara telekomunikasi raksasa Nippon Telegraph and Telephone (NTT) menyusul dilakukannya deregulasi sektor finansial pada 1986. Inggris risi dengan adanya dominasi asing dalam industri perbankannya. Masyarakat Australia menentang rencana perdana menteri John Howard tahun 2002 yang hendak menjual sisa 51% saham perusahaan negara telekomunikasi Telstra sehingga akhirnya dibatalkan. A. Tony Prasetyantono (2009) meminjam istilah Mitsuhiro Kagami (2000) dengan menyebutkan gelombang penolakan masyarakat London atas privatisasi bank milik pemerintah Inggris dengan istilah *Wimbledon Effect*, dimana juara tenis *grand slam* *Wimbledon* terasa selalu pahit karena selalu berada di tangan petenis asing sehingga petenis Inggris tidak bisa menjadi juara.

Meminjam tipologi Murtha dan Lenway (1994), karakteristik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang lahir dari kancan revolusi kemerdekaan lewat keberhasilan membebaskan diri dari penjajahan asing pun mestidiperhatikan ketika privatisasi diprogramkan pemerintah. Rakyat sulit menerima bahwa, setelah berhasil bebas dari penjajahan asing, kini kembali terjajah oleh asing lagi secara ekonomis. Karakteristik nasional lain ialah eksistensi Pancasila yang *conditio-sine-qua-non* bagi bangsa Indonesia menjadi landasan dasar filosofis di mana salah satu silanya berupa: 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' dengan kandungan 'Demokrasi Ekonomi' selain 'Demokrasi Politik' berupa ekonomi kerakyatan sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 sebelum amandemen. Penguasaan asing lewat privatisasi hakekatnya bertanggadengansila Keadilan Sosial karena ketiadaan keberpihakan kepada rakyat yang miskin dan terbelakang (Sri-Edi Swasono, 2008). Modal asing yang berhasil mengeruk untung lewat privatisasi BUMN pun pasti memulangkan (*repatriation*) keuntungan itu ke negeri asalnya sehingga menguras persediaan devisa negara.

Sebagai tambahan, Lenway dan Murtha (1994) pun menyarankan agar melakukan pengkajian mendalam berdasarkan empat kategori dimensi sebelum melakukan privatisasi:

1. Peran dan pandangan pemerintah terhadap prinsip-prinsip mekanisme pasar
2. Apakah kebijakan umum pemerintah mendahulukan masyarakat atau memberikan tempat yang kuat bagi individu/perorangan/privat, termasuk asing
3. Apakah pengambilan keputusan pemerintah cenderung menitikberatkan segi politis atau segi ekonomi.
4. Seberapa besar pemerintah menilai fungsi akibat besarnya kepemilikan negara terhadap efisiensi kinerja perusahaan secara menyeluruh

Pandangan serta kebijakan pemerintah seperti diutarakan oleh Lenway dan Murtha (1994) terhadap

mekanisme pasar bebas berkorelasi langsung terhadap program privatisasi yang dijalankan, sekaligus juga merupakan tolok-ukur seberapa jauh pemerintah mau melepaskan kepemilikan sahamnya. Di pihak lain, faktor-faktor tsb juga menjadi pertimbangan calon investor dalam menentukan apakah ikut membeli saham BUMN yang ditawarkan. Umumnya, semakin besar persetujuan pemerintah atas berlakunya mekanisme pasar bebas, penawaran privatisasi semakin menarik bagi calon investor. Di pihak lain, klaim adanya program-program bantuan sosial masyarakat semacam Bantuan Langsung Tunai/BLT tidak serta-merta melunturkan nuansa liberalisme (klasik ataupun neo) yang melekat oleh karena di A.S yang sangat kapitalis sekalipun program *Social Security* diberlakukan, selain adanya program nasionalisasi berupa *bail out* korporasi yang dilakukan oleh pemerintah A.S sekarang (TEMPO, 21 September 2008, hal. 100-102)

Dimensi lainnya, misalnya pertimbangan perlindungan keamanan negara, sosial kemasyarakatan, motif politik, motif ekonomi, perludikaji oleh karena dapat menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif pasca privatisasi tergantung dari sudut pandang pemerintah atau investor. Pemerintah, misalnya, dapat mewajibkan manajemen baru pasca privatisasi melakukan program-program sosial kerakyatan tertentu yang populis, yang dari sudut investor bakal menambah beban perusahaan. Kebijakan pemerintah memasukkan unsur *buy-back* sebagai syarat penjualan/opsi saham kepada investor bisa menyulitkan investor di kemudian hari. Umpamanya, pemerintah Thailand memutuskan untuk membeli kembali (nasionalisasi) saham *Kumagai Gunn* dari Jepang sebanyak 65% dalam perusahaan *Thai Express Way and Transit Authority* di Bangkok gara-gara perbedaan pendapat yang kian meruncing setelah privatisasi dilakukan (Wells dan Gleason, 1995). Jadi, tidak benar hanya pemerintah-pemerintah neo-sosialis di Amerika Latin yang senang melakukan

nasionalisasi saham-saham maupun perusahaan milik asing.

Menurut Nankani (1990) adanya ketentuan-ketentuan pasca privatisasi berpeluang menurunkan komitmen pemerintah maupun minat investor karena sisa-sisa kepemilikan saham pemerintah dapat mengganggu keberhasilan kinerja perusahaan. Dapat pula terjadi pengadilan setempat berpihak kepada negara jika timbul sengketa tanpa mengadili secara adil. Goldman (1994) misalnya memberikan contoh bagaimana pemerintah maupun pengadilan Rusia berpihak kepada dua orang karyawan hotel *Radisson Slavyanskaya* di Moskow ketika terjadi sengketa antara karyawan itu dengan pihak manajemen baru yang asing sehingga mengakibatkan dibekukannya rekening bank milik hotel senilai jutaan dolar. Goldman juga mencontohkan bagaimana sikap patriotisme nasionalisme pengusaha Jepang yang tinggi sehingga enggan melakukan investasi pada BUMN Rusia termasuk investasi di bidang usaha lainnya sejak zaman Uni Soviet akibat sengketa kepemilikan kepulauan Kuril sebagai salah satu *dispute* antara kedua negara seusai Perang Dunia II.

Jelaslah bahwa bagi pendukungnya, privatisasi sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi pasar bebas perlu diamankan hasil-hasilnya, dan pelaksanaannya terus dilanjutkan. Utamanya, perlu disinambungkan kebijakan umum pemerintah agar privatisasi itu tidak diubah lagi oleh pemerintah lain/baru yang berkuasa. Terutama di negara-negara berkembang yang cenderung melakukan regulasi kepemilikan saham maupun kebebasan pasar lewat kebijakan prorakyat yang populis melindungi pranata sosial kemasyarakatan seperti buruh, tani, nelayan, pemulung, pengusaha kecil/menengah, serta pengusaha 'rambut hitam' (baca: pengusaha domestik nasional) lainnya sejalan dengan konsep dan Lenway dan Murtha (1994) tadi, yaitu mendahulukan kepentingan rakyat banyak.

Terjemahan dari kepastian serta perlindungan itu ialah dengan selalu mendukung pemerintah yang ramah

kepada investor asing dan yang setia kepada kebijakan liberalisasi pasar bebas. Sebaliknya, jika muncul pemerintah (baru) yang menjalankan program ekonomi kerakyatan, atau ekonomi kebangsaan, menjadi bahaya bagi kelangsungan program privatisasi (termasuk bahaya munculnya kebijakan pasca privatisasi). Mengingat program privatisasi mengandung banyak kekurangan ditinjau dari segi kepentingan bangsa sebagaimana telah disampaikan di bagian awal artikel ini, seyogyanya program privatisasi dipikirkan ulang agar jangan menjadi ajang menangguk keutungan sebesar-besarnya buat investor asing belaka. Bahkan, jika privatisasi terkait bank BUMN, menurut analisis A. Tony Prasetyantono (2009) pemerintah masih sangat memerlukan BUMN, khususnya bank BUMN itu sehingga kepemilikan asing perlu dibatasi. Jika tanpa bank BUMN, siapa bisa menjamin bank-bank swasta asing mau memberikan kredit korporasi atau kredit infra-struktur yang berpotensi menggerakkan ekonomi tapi sarat resiko?

Terlebih lagi, mega skandal Enron, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers dkk membuktikan telah terjadinya 'perselingkuhan' kapitalisme finansial pasar bebas yang mengubah para penjaga gawang seperti akuntan, banker investasi, ikut menjadi pelaku utama keterpurukan atau kejahanan bisnis bersama-sama dengan para petinggi bisnis di bawahnya. Masuknya norma-norma sosial *zero-sum game* ke dalam budaya korporasi sebagaimana disebutkan Yangkelovich (lihat, Yudi Latif, 2009:17). Lebih jauh lagi, Reich (dalam Yudi Latif, 2009:17) bahkan menyebutkan bagaimana superkapitalisme yang dibangun lewat persaingan bisnis telah memaksa kebijakan negara demi melindungi kepentingan pebisnis melalui dana-dana besar yang mengalir. Di pihak lain, peran negara yang mestinya mampu menjamin distribusi yang adil menjadi terkendala sehingga menggerus proses demokrasi yang dicita-citakan oleh para *founding fathers* Soekarno-Hatta berupa demokrasi ekonomi (lihat *Mentjapai Indonesia Merdeka* tahun 1933 oleh

Bung Karno serta *Menuju Indonesia Merdeka* oleh Bung Hatta tahun 1932) sebagaimana diuraikan pula oleh Yudi Latif (2009). Dari pemetaan tadi terlihat betapa kapitalisme finansial liberal sesungguhnya memiliki kelemahan struktural serta bahaya *moral hazard* sehingga berbahaya bagi masa depan perekonomian bangsa Indonesia. Senyataanya, *mainstream* kapitalisme liberal pasar bebas terbukti selalu menciptakan krisis serta upaya menegaskan krisis itu dari waktu ke waktu senantiasa gagal (Defiyan Cori, 2009)

Demikian analisis yang perlu dilakukan dengan mengikuti pemikiran Murtha dan Lenway (1994) serta Lenway dan Murtha (1994) sebagai pakar yang telah banyak melakukan kajian serta penelitian dalam bidang privatisasi sehingga perlu direnungkan secara mendalam sebelum pemerintah Indonesia 'aktif' kembali menjalankannya di waktunya. Dengan batalnya (untuk sementara?) program privatisasi berikut banyaknya permasalahan program privatisasi jika tetap dilakukan maupun kerawanan penerbitan SUN (Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia, No 12 2009:40) yang makin lamanya bertambah besar jumlahnya, pemerintah suka-tidak-suka mesti memikirkan opsi lain di atas. Pengalaman pahit selama rezim Orde Baru yang seumur-umurnya menambah utang sehingga sampai akhir hayatnya tidak mampu membayar lunas akibat terjerik ke dalam *debt trap* mesti menjadi pertimbangan serius pemerintah untuk tidak mengulangi lagi strategi penambahan utang terus menerus, melainkan mulai mengurangi ketergantungan itu.

Sejauh ini pemerintah tidak mau melakukan opsi-opsi lain itu karena kekuatirannya dianggap gagal bayar (*default*) oleh komunitas kreditor internasional. Namun, jika terlalu berat beban utang, yang bertambah terus itu tanpa jalan keluar alternatif, status gagal bayar terjadi juga akhirnya dengan beban ekonomis, sosial, bahkan politis lebih besar lagi seperti yang dilihat dari pengalaman rezim Orde Baru.

Kesimpulan

Bagi pemerintah Indonesia, strategi privatisasi BUMN merupakan kebutuhan mendesak oleh karena penekannya adalah pada kebutuhan menambal kekurangan APBN, selain program utang luar negeri melalui penerbitan surat utang negara/SUN. Sebenarnya, privatisasi yang dilakukan pun tidak boleh sembarangan asal menambah pendapatan negara melainkan harus memenuhi proses yang tepat sesuai dengan amanat Undang-Undang maupun Masterplan BUMN yang ada.

Walaupun pada kenyataannya privatisasi, baik di Indonesia ataupun di negara lain, seringkali ditolak masyarakat atas dasar nasionalisme serta lambang-lambang kebangsaan lain, kondisi ekonomi dunia yang tidak baik sekarang ini yang telah 'berhasil menunda' program privatisasi. Bukan karena pemikiran strategis lewat konsep yang ada, misalnya oleh Murtha dan Lenway (1994), Lenway dan Murtha (1994), oleh Yangkelovich (2006), juga oleh Reich (2007) (kedua-duanya dalam Yudi Latif, 2009) ataupun A.Tony Prasetyantono (2009). Juga bukan karena kesadaran terhadap pentingnya pemikiran para *founding fathers* yaitu Soekarno-Hatta.

Dalam kondisi perekonomian global yang dicirikan oleh penguasaan pemikiran liberalisme pasar bebas dewasa ini, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan pro-pasar secara pragmatis dan berkelanjutan tanpa memberikan tempat bagi pemikiran alternatif selain bergantung kepada pasar bebas saja. Padahal, presiden Obama saat ini malah melakukan program nasionalisasi dengan 'membeli' korporasi AS yang mengalami kebangkrutan sehingga bertentangan sekali dengan program privatisasi yang didengung-dengungkan oleh kelompok pro liberalisme pasar bebas. Pandangan yang bersifat 'myopia' jarak pendek akan menyulitkan program pemerintah Indonesia dalam jangka panjang akibat menanggung beban keuangan yang tiap tahun kian membesar karena defisit APBN.

Seratnya dana internasional akan menyebabkan baik rencana privatisasi maupun rencana penerbitan surat utang negara makin sulit dilakukan akibat efek *crowding out* sehingga sudah waktunya pemerintah memikirkan pula opsi berupa

restrukturisasi utang, pemotongan utang dsb dengan para kreditor demi kemaslahatan bangsa sebagai pemikiran alternatif di bidang pengelolaan keuangan negara agar jangan mengulangi pengalaman Orde Baru. □

Daftar Referensi

Aditya Suaharmoko. 2009a. Deficit financing on track. *Kompas*, 11 Agustus, hal. 14
———. 2009b. Bank loans grow just 2 percent in H1. *Kompas*, 13 Agustus, hal. 13.
Aharoni, Y. 1986. *The evolution and management of State-Owned enterprises*. Cambridge, Mass: Balinger.
A.Tony Prasetyantono. 2009. Wimbledton effect dalam industri perbankan kita. *TEMPO*, 9 Agustus, hal. 82-83
Bank Indonesia. 2009. Kajian Stabilitas Keuangan. No 12, Maret.
Bello, W. The global collapse: a non-orthodox view. M.RZine dalam <http://monthlyreview.org/mzine/bello200209.html> diakses 22 Februari 2009. Dalam Vedi R. Hadiz. Krisis ekonomi dunia dan Indonesia. *Prisma*, vol.28 (Juni) 2009, hal. 3-14.
Boubakri, N; Cosset, J-C & Smaoui, H. 2009. *Journal of International Business Studies*, Vol 40 (5), hal. 840-858.
Budi Winarno. 2009. *Pertarungan negara vs pasar*. Yogyakarta: MedPress.
Daniel Dhakidae. 2009. Menyapa *Prisma* yang datang lagi. *Prisma*, vol 28 (Juni), hal. 40-43.
Defiyan Cori. 2009. Merekonstruksi sistem ekonomi kontitusional. *Kompas*, 18 Agustus, hal. 38.
Dwi Tupani. 2009. Rasio utang meng-khawatirkan. *Media Indonesia*, 14 Agustus, hal 1.
Fahmy Radhi. 2009. Privatisasi BUMN dan agenda neoliberal. *Simar Harapan*, 29 Juni hal. 1.
Goldman, M. 1994. The Russian investment dilemma. *Harvard Business Review*, Mei-Juni, hal. 35-37.
Goodman, JB & Loveman, GW. 1991. Does privatization service public interest? *Harvard Business Review*, 69 (6), hal. 26-38.
Jakarta Post. 2009. Ministry working on raising dividend from state firms. 14 Agustus, hal. 13.
Jurnal BUMN. 2008. Privatisasi mendongkrak laba bersih. Edisi 1, Febr, hal.12-13.
Keynes, JM. 1936. *The general theory of employment, interest, and money*. Harbinger Book edition, 1964.
Klein, N. 2009. The shock doctrin: the rise of disaster capitalism. New York: Henry Holt. Dalam Yudi Latif, Requiem dini krisis finansial dan krisis demokrasi. *Prisma*. Vol 28 (Juni), 2009, hal. 15-23.
Kompas. 2009. Privatisasi BUMN dibatalkan. 31 Juli, hal. 18.
Kvint, K. 1994. Now is the time to do business in Russia. *Harvarf Business Review*, Mei-Juni, hal. 42-43.
Lenway, SA & Murtha, TP. 1994. The state as strategist in International Business Research. *Journal of International Business Studies*, 25 (3), hal. 513-536.
MacKenzie, DW. Liquidity trap versus inflation trap. Ludwig von Mises Institute, posted 12/23/2008.
Media Indonesia. 2009. Makin sulit mencari utang untuk menutup APBN. 5 Oktober, hal 1.
Megginson, W & Netter, J. 2001. From state to market: a survey of empirical studies on privatization. *Journal of Economic Literature*, 39 (2), hal. 321-398.
Murtha, TP & Lenway, SA. 1994. Country capabilities and the strategic state: how National Political Institutions affect Multinational Corporation Strategies. *Strategic Management Journal*, 15 (Summer), hal. 113-130.
Nankani, HB. 1990. Lessons of privatization in developing countries. *Finance and Development*, 27 (Maret), hal. 43-45. *Outline Bank Indonesia*. 2009. Perkembangan ekonomi terkini dan tantangan kebijakan moneter. Agustus.
Pesek, W. 2009. What 'Big Mac' says after Lehman's fall. *The Jakarta Post*, 11 Agustus hal. 7.
Prisma. 2009. Senjakala kapitalisme & krisis demokrasi. Cover, No 1, vol 28. Juni. LP3ES.
Reich, RB. 2007. Supercapitalism: the transformation of business, democracy, and everyday life. New York: Alfred A. Knopf. Dalam Yudi Latif, Requiem dini krisis finansial dan krisis ekonomi. *Prisma*, vol 28 (Juni), hal. 15-23.
Roderick, D. 1996. Understanding economic policy reform. *Journal of Economic Literature*. 34 (Maret).
Sinar Harapan. 2009. Dunia terhindar dari Depresi Besar kedua. 11 Agustus, hal. 7.
Siswono Yudo Husodo. 2009. Menyimak utang negara. *Kompas*, 5 Agustus, hal. 6.
Stiglitz, JE. 2009. Options to jump-start the economy: stimulate or die. *The Jakarta Post*, 11 Agustus, hal. 7.
Sri-Edi Swasono. 2008. Mewaspada neoliberalisme: kerakyatan dan demokrasi ekonomi. Institute for National Strategic Interest and Development/Yayasan Kepada Bangsaku.
TEMPO. 2008. Baru langkah awal. 21 September, hal. 100-102.
Vickers, J & Yarrow, G. 1988. *Privatization: an economic analysis*. Cambridge, Mass: MIT Press.
Wells, LT & Gleason, ES. 1995. Is foreign infrastructure investment still risky? *Harvard Business Review*, September/Okttober, hal. 44-55.
Wimbah Santosa; Bagus Santoso; Ita Rulina & Elis Derianto. 2009. Dampak contagion risk pada Pasar Modal Indonesia. Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia, no 12 (Maret), hal. 75-84.
Yangkelovich, D. 2006. Profit with honor: the new stage of market capitalism. New Haven: Yale University Press. Dalam Yudi Latif, Requiem dini krisis finansial dan krisis demokrasi. *Prisma*, 2009, vol 28 (Juni), hal. 15-23.
Yudi Latif. 2009. Requiem dini krisis finansial dan krisis demokrasi. *Prisma*, vol. 28 (Juni), hal. 15-23.

Lembaga
Management Fakultas
Ekonomi Universitas
Indonesia ("LM-FEUI")
beroperasi sejak
tahun 1963.

Sebagai konsultan
manajemen, LM-FEUI
memiliki misi untuk
menjadi mitra yang
dapat diandalkan
dalam mengatasi ma-
salah manajemen
klien



Lembaga Management

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA



■ KONSULTASI MANAJEMEN

Bekerjasama dengan klien, divisi konsultasi membantu memecahkan berbagai persoalan manajemen dan membantu pengambilan keputusan secara tepat.

■ PENELITIAN

LM bergerak pula di bidang jasa penelitian, mulai dari menyusun kuesioner, melakukan survei, sampai memproses dan menganalisis data. Proyek penelitian terkini banyak dilakukan bekerjasama dengan institusi internasional seperti JICA, USAID dan World Bank.

■ REKRUITMEN SELEKSI DAN PENEMPATAN (RSP)

Membantu klien dalam proses seleksi dan evaluasi karyawan, baik mulai tes psikologi maupun tes kompetensi. Dalam menyelenggarakan tes untuk calon karyawan, LM selalu menggunakan metode serta bahan-bahan tes mutakhir, diikuti dengan wawancara mendalam dengan calon karyawan dalam upaya untuk memperoleh kualitas sumber daya manusia yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan klien.

■ ASESMEN

Mencakup jasa evaluasi manajer atas dan menengah sebelum mereka ditugaskan untuk posisi dan jabatan tertentu

■ PELATIHAN

Merancang dan menyelenggarakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia

■ PUBLIKASI

Sebagai lembaga otonomi di bawah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, LM memiliki komitmen tinggi dalam menerbitkan majalah bulanan *Manajemen Usahawan-Indonesia*, sebuah publikasi yang diakreditasi oleh Depdiknas, yang terutama memusatkan perhatian pada pengembangan ilmu manajemen.

■ PUSAT DATA INFORMASI

Informasi yang akurat dan mutakhir merupakan kekuatan kami dalam memecahkan berbagai persoalan bisnis dan manajemen

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Lembaga Management FEUI

Jl. Salemba Raya 4 Jakarta 10430, PO Box Jakarta 10014

Telp. 62-21 3193 4142, 390 7410, Fax. 021 - 3193 1610

Web Site : www.lmfeui.com

Contact Person:
Catur Prasetyo - Manajer Korporat